

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Goldman Sachs Group, Inc adalah perusahaan perbankan yang didirikan pada tahun 1869 oleh Marcus Goldman di New York, Amerika Serikat. Goldman Sachs merupakan salah satu korporasi perbankan investasi multinasional yang bergerak di bidang investasi perbankan global, manajemen investasi, sekuritas dan jasa keuangan lainnya.¹ Sebagai salah satu korporasi yang peduli terhadap *human development*, pada tanggal 5 Maret 2008 Goldman Sachs menginisiasi sebuah mega proyek pembangunan yang diberi nama *Goldman Sachs: 10,000 Women Initiative*.

Program ini merupakan salah satu program pemberdayaan perempuan terbesar yang dijalankan oleh Goldman Sachs dengan tujuan membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian lokal dengan menyediakan *business education, mentoring and networking*, serta memberikan akses modal kepada pengusaha-pengusaha perempuan yang tidak terfasilitasi secara global. Selain itu, masih banyak program *citizenship* atau *Corporate Social Responsibility (CSR) Programs* yang diselenggarakan oleh Goldman Sachs di seluruh dunia. Adapun, program CSR yang telah disebutkan tersebut berkoordinasi serta berkolaborasi atau bekerjasama dengan berbagai aktor-aktor profesional lintas negara seperti universitas-universitas di beberapa negara, NGO atau LSM dan lain-lain. Salah satu partner dalam menjalankan

¹ Steve Schaefer. "Goldman Sachs Group". Diakses dari <http://www.forbes.com/> "pada tanggal 5 April 2016 pukul 2.14

program tersebut adalah NGO *Campaign for Female Education* (Camfed) *International*.²

Camfed (*Campaign for Female Education*) International didirikan oleh Ann Cotton pada tahun 1993 di United Kingdom. Camfed adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang mewakafkan organisasi untuk memerangi kemiskinan, ketidaksetaraan dan HIV / AIDS yang dialami masyarakat pedesaan di Afrika dengan mendidik anak-anak perempuan, berinvestasi dalam kemandirian ekonomi mereka dan serta memberdayakan perempuan-perempuan muda untuk berani melangkah sebagai pemimpin perubahan setelah pendidikan mereka selesai. Sejak berdiri pada tahun 1993, Camfed telah bekerja dalam kemitraan dengan masyarakat pedesaan yang ada di Afrika untuk membawa angin perubahan bagi masyarakat Afrika, terkhusus perempuan-perempuan Afrika.³

Selama ini, NGO Camfed International sudah banyak melakukan afiliasi atau kerjasama atau bermitra dengan berbagai pihak dalam rangka menjalankan program-program pemberdayaan di negara-negara sedang berkembang. Menarik dilihat ketika pada tahun 2008, bersama dengan perusahaan Bank Investasi Multinasional Goldman Sachs yang notabene adalah korporasi bekerjasama melalui sebuah program pemberdayaan perempuan yang dinamakan *10,000 women's Initiatives*.⁴

² Goldman Sachs. "*10,000 Women Initiative* " <http://www.goldmansachs.com/citizenship/10000women/>. Di akses pada tanggal 5 April 2016 pukul 3.02

³ Camfed. "*Camfed International*". <https://camfed.org/> Diakses pada tanggal 5 April 2016 pukul 3.42

⁴ Cambridge . "*10,000 Women*" <http://www.cam.ac.uk/news/10000-women>. Di akses pada tanggal 5 April 2016 pukul 4.01

Peran kooperatif yang diselenggarakan oleh korporasi Goldman Sachs bersama dengan NGO Camfed International dan juga aktivitas-aktivitas kooperatif lainnya yang dilakukan oleh korporasi dan NGO diluar sana, akan mampu mempercepat proses integrasi aktor hubungan internasional dalam rangka suksesi pemberdayaan serta pembangunan sosial di seluruh dunia. Jelas saja, karena era globalisasi sekarang ini menuntut penuh akan hal itu.

Memberdayakan perempuan agar bisa berpartisipasi penuh dalam setiap sektor kehidupan sangatlah penting. Membangun ekonomi kuat, meningkatkan kualitas hidup wanita khususnya dan masyarakat pada umumnya dan serta guna mencapai salah satu tujuan dari SDGs yakni menjamin kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan, telah menjadi misi fundamental bagi setiap negara di seluruh dunia.

Pertanyaannya adalah mengapa pemberdayaan perempuan menjadi sangat penting sekarang ini? Jawabannya ada pada Sebuah *essay* yang penulis kutip dari *importantindia.com* yang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 10 alasan untuk menjawab itu. Diantaranya adalah jumlah pengangguran wanita yang sangat besar, wanita sama-sama berkompeten dengan pria, perempuan sangat bertalenta, mengurangi kekerasan domestik, mengurangi kemiskinan dan lain-lain. Yang paling utama dari memberdayakan perempuan adalah dengan memberdayakan perempuan maka negara telah melakukan pembangunan terhadap masyarakat secara menyeluruh.

5

⁵ Team work. "Essay on Women Empowerment". <http://www.importantindia.com/19050/essay-on-women-empowerment/>. Di akses pada tanggal 7 April 2017, pukul 16.09"

Pentingnya melakukan pemberdayaan terhadap perempuan juga disampaikan oleh Amartya Sen seorang peraih Nobel bidang Ilmu ekonomi pada tahun 1998 dan juga seorang dosen di Harvard University mengemukakan bahwa,

*“Empowering women and girls with more choices and more freedoms is crucial to Achieving a better future for all”. Countries that have expanded opportunities for women and girls in education and work in recent decades have largely achieved greater prosperity and moderated population growth while limiting child mortality and achieving social progress for all, Sen said. “These greater opportunities and freedoms...have had truly astonishing results,” he said. “There is an overwhelming need to pay attention to the needs of girls and women.”*⁶

Sejalan dengan penyampaian Amartya Sen tersebut, setiap aktor hubungan internasional sudah seharusnya melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, entah oleh negara sebagai entitas yang paling bertanggungjawab atas hal itu, atau korporasi atau NGO atau kerjasama antara korporasi dan NGO tersebut dalam memberdayakan perempuan-perempuan di seluruh dunia. Idealita dalam hubungan internasional yang sangat baik jika itu bisa benar-benar terjadi ditengah-tengah *Sceptical View* sebagian kalangan terhadap kaum *Hyper-Globalist* atau dalam hal ini korporasi dan sebagainya. Karena pada dasarnya, permasalahan perempuan tidak hanya dihadapi oleh satu atau dua negara saja melainkan seluruh dunia. Maka dari itu, perlu ada upaya atau tindakan nyata aktor-

⁶ UNDP. “Empowering Women is Key to Building a Future We Want, Nobel Laureate <http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/articles/2012/09/27/empowering-women-is-key-to-building-a-future-we-want-nobel-laureate-says.html> . Di akses pada tanggal 7 April 2017 pukul 16.59)

aktor HI dalam hal ini negara, korporasi, NGO dan lainnya untuk memberdayakan perempuan di seluruh dunia.

Republik Zambia merupakan negara yang terletak di kawasan Afrika bagian selatan. Salah satu negara yang berhasil mendapatkan kemerdekaannya pada hari Sabtu, 24 Oktober 1964 dari penjajahan yang dilakukan oleh Inggris Raya. Zambia merupakan salah satu negara di Afrika yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang lebih berlimpah apabila dikomparasikan dengan negara Afrika lainnya. Kekayaan sumber daya alam Zambia meliputi batubara, kobalt, seng, timah, emas, perak, tenaga air, uranium dan tembaga. Pengolahan dan industri pertambangan tembaga merupakan industri yang paling penting bagi Zambia.

Kekayaan sumber daya alam Zambia berbanding terbalik dengan kondisi perekonomian dan sosial yang sejatinya dapat ditopang melalui hal tersebut. Permasalahan ekonomi seperti angka kemiskinan yang tinggi menjadi momok tersendiri bagi Zambia, ditambah lagi dengan berbagai macam permasalahan sosial seperti kelaparan, angka pengangguran yang tinggi dan HIV-AIDS mengancam Zambia dari dalam negara. Permasalahan tersebut diperparah dan berbanding lurus dengan permasalahan yang dihadapi perempuan Zambia, permasalahan seperti *Gender Inequality*, kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan dan angka buta huruf perempuan yang tinggi merupakan kondisi dan situasi yang tengah dihadapi Zambia saat ini. Asumsinya adalah masalah ekonomi di Zambia berimplikasi pada munculnya permasalahan-permasalahan sosial utamanya perempuan di Zambia.

Oleh sebab itu, telah diselenggarakan program terkoordinasi di Republik Zambia, kolaborasi antara salah satu korporasi perbankan swasta terbesar di dunia *Goldman Sachs*, bersama dengan sebuah lembaga non-profit *Campaign for Female Education* (Camfed) International dan Universitas Cambridge melalui mega proyek yang dinamakan sebagai program *Goldman Sachs: 10,000 Women's Initiative*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka didapat sebuah pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: Bagaimana kemitraan pembangunan sosial oleh korporasi *Goldman Sachs* dan NGO *Campaign for Female Education (Camfed) International* dalam memberdayakan perempuan di Republik Zambia 2008-2010?

C. Teori/Kerangka Pemikiran

1. Konsep Corporate Social Responsibility

Perdebatan mengenai definisi baku *Corporate Social Responsibility (CSR)* sudah mulai ada sejak puluhan tahun yang lalu. Singkatnya, definisi umum yang diketahui terkait CSR ini adalah bahwa aktivitas bisnis, perusahaan ataupun korporasi memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi terhadap hasil ekonomi yang memenuhi harapan masyarakat. Selain itu, *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* juga mendefinisikan CSR sebagai,

"is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the equality of life of the workforce and either familie as well as of the local community and society at large" – singkatnya, korporasi atau perusahaan harus berkomitmen untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kehidupan pekerja (masyarakat).⁷

Relevansi gagasan umum ini masih juga diperdebatkan, meskipun tidak bisa mengakomodir semua keinginan serta pendapat terkait tanggung jawab perusahaan atau korporasi terhadap sosial, gagasan umum ini setidaknya bisa dijadikan sebagai *stepping stone* atau batu pijakan untuk memahami arti dari *Corporate social Responsibility (CSR)* itu sendiri.

Brent D. Beal penulis buku *Corporate Social Responsibility* mengutip salah satu definisi tentang CSR itu dari gagasan Howard R. Bowen yang dikutip dalam bukunya pada tahun 1953 yang berjudul "*Social Responsibilities of The Businessman*" yang kemudian menjadi *magnum opus* dalam memahami peran korporasi atau bisnis atau usaha terhadap sosial. Howard menyatakan

"The term social responsibilities of businessmen will be used frequently. It refers to the obligations of businessmen [and businesswomen] to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society. This

⁷ WBCSD. "*Corporate Social Responsibility*". <http://old.wbcd.org/work-program/business-role/previous-work/corporate-social-responsibility.aspx> Diakses pada tanggal 7 Mei 2017 pukul 22.27

definition does not imply that businessmen as members of society lack the rights to criticize the values. . . . It is assumed, however, that as servants of society, they must not disregard socially accepted values or place their own values above those of society.”

Singkatnya, gagasan Howard ini mengacu pada tanggung jawab korporasi terhadap kebijakan atau agenda CSR tersebut, korporasi sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri tidak boleh mengabaikan nilai-nilai sosial yang diterima atau menempatkan nilai mereka sendiri di atas kepentingan masyarakat.⁸

- 3 Asumsi Dasar *Corporate Social Responsibility (CSR)* menurut Beal

Beal (2014) mengemukakan bahwa ada 3 asumsi dasar yang dapat kita jadikan sebagai fondasi mengapa *Corporate Social Responsibility* ini harus dilaksanakan atau diimplementasikan oleh pengusaha, korporasi dan lainnya, ketiga asumsi tersebut adalah *Mutual Dependence*, *Social Institutions* dan *Social Control*.

Beal menyebutkan kalau bisnis dan masyarakat saling berkaitan, nilai ekonomi dapat diciptakan melalui aktivitas pasar maupun melalui proses pemerintahan atau sosial. Maka dari itu, pendekatan ini saling tergantung atau yang disebut Beal disini sebagai *mutual dependence*. Contoh sederhana, akan sulit bagi bisnis atau korporasi untuk beroperasi tanpa keamanan, hak

⁸ Brent D. Beal, (2014). *Corporate Social Responsibility: Definition, Core and Developments*. California. Sage Publications

kepemilikan, sistem moneter, infrastruktur publik, dan pengawasan peraturan. Demikian juga, akan sulit bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya tanpa adanya aktivitas dari usaha-usaha yang produktif.

Kedua, pasar adalah institusi sosial – *Social Institutions*. - Untuk efisiensi operasi usaha, korporasi memerlukan gabungan norma bersama, peraturan yang dapat dilaksanakan, lembaga pendukung dan *public goods*. Dan pada akhirnya, *Corporate Social Responsibility (CSR)* kemudian membentuk sistem ekonomi dengan harapan mencapai hasil tertentu. Jika hasil ini tidak direalisasikan, maka masyarakat dapat memilih untuk mengubah atau mengubah sistem ekonomi mereka. *License to Operate* dan *The Iron Law of Responsibility* merupakan 2 konsep penting dalam menerapkan serta mengimplementasikan fungsi *social control* terhadap sistem ekonomi.⁹

2. Pendekatan Perspektif Globalisasi: *Hyper-Globalist*, *Sceptic-Globalist* dan *Transformationalist*

Memasuki era *millennium* seperti sekarang ini, siapa yang tidak tahu dengan istilah globalisasi. Tak ayal, banyak kalangan akademisi, praktisi, negarawan dan bahkan masyarakat sipil sekalipun yang memperdebatkan globalisasi dari berbagai sudut pandang dan pendekatan teori maupun fakta. Dalam studi Ilmu Hubungan Internasional, debat besar globalisasi menjadi suatu kajian yang akademis melalui kemunculan perdebatan besar 3 (tiga)

⁹ Ibid hal. 30-31

perspektif globalisasi yaitu Perspektif *Hyper-Globalist*, perspektif *Sceptic-globalist* dan perspektif *Transformationalist* yang dikemukakan oleh David Held dan Anthony McGrew dalam bukunya *Global Transformations* (1999).¹⁰

Penulis merangkum penjelasan ketiga perspektif diatas melalui pandangan Adde Marup (2016) pada sesi perkuliahan Kajian Globalisasi. Diantaranya sebagai berikut:

a. Perspektif *Hyper-Globalist*

Perspektif *Hyper-Globalist* memandang bahwa fenomena globalisasi merupakan sebuah keniscayaan sejarah yang berwujud fenomena abad global dengan keyakinan bahwa segala pihak dapat meraih keuntungan dari fenomena globalisasi ini. Pihak-pihak seperti MNCs, TNCs dan negara-negara kaya merupakan pihak yang tergolong sebagai bagian dari perspektif ini. Perspektif ini memandang bahwa globalisasi m

b. Perspektif *Transformationalist*

Terakhir, perspektif *Transformationalist* memandang globalisasi muncul karena proses evolusi panjang sistem atau tatanan sosial umat manusia. Globalisasi tidak hanya menyangkut persoalan ekonomi saja, tetapi cakupan yang lebih luas seperti kebudayaan, nilai-nilai, etika, ekologi dan migrasi umat manusia, sederhananya globalisasi membentuk

¹⁰ Adde Marup Wirasenjaya. (2016), *Kajian Globalisasi*, **Diambil dari kuliah: Beberapa Perspektif Tentang Globalisasi**. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

pola-pola baru dari segi hubungan antar bangsa, kemunculan aktor-aktor baru diluar Negara, termasuk peran-peran didalamnya.

Aktor-aktor baru seperti *Multi-National Corporations*, *Trans-National Corporations*, *Non-governmental Organizations*, masyarakat transnasional dan sebagainya itu cenderung memiliki peran yang lebih besar terhadap pembangunan di segala aspek yang disebabkan oleh globalisasi. Akan tetapi, hal tersebut tidak mengecilkan ataupun menghilangkan peran dari negara. Lebih tepatnya, menurut kaum *Transformationalist* fenomena globalisasi akan mendefinisikan ulang perannya sebagai implikasi dari munculnya aktor-aktor baru tersebut.¹¹

Kecenderungan saling sikut antara perspektif *Hyper* dan *Sceptic* seolah-olah memberikan sebuah arena perdebatan yang tak akan pernah usai. Kaum *Hyper* yang direpresentasikan oleh korporasi sebagai wujud dari kapitalisme global dan *Sceptic* yang direpresentasikan oleh NGO dan para aktivis. Namun, kaum *Transformationalist* melihat kedua perspektif diatas bisa bersama-sama mewujudkan pembangunan yang efektif tatkala menjalin kemitraan bersama dengan negara.

3. *Social Development* (Pembangunan Sosial)

Pada hakekatnya konsep *social development* atau pembangunan sosial merupakan sebuah konsep pembangunan yang mengkolaborasikan aspek sosial

¹¹ Ibid

dan aspek ekonomi dalam masyarakat. Berbagai macam model telah dirumuskan oleh beberapa kalangan untuk menggambarkan pembangunan. Umumnya, gambaran mengenai pembangunan itu dimulai dari suatu keadaan yang belum tersentuh pembangunan sama sekali atau proses yang dilakukan untuk pembangunan kembali: semacam perencanaan atau *blueprint* untuk pembangunan tersebut. James Midgley melalui karyanya yang berjudul *Social Development: The developmental Perspective in Social Welfare* mengkonsepkan tentang pembangunan sosial sebagai “Proses perubahan sosial yang dirancang atau direncanakan untuk mempromosikan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dalam hubungannya dengan proses dinamis pembangunan ekonomi”. Tujuan dari pembangunan sosial dalam konteks kesejahteraan modern adalah untuk menghasilkan kesejahteraan sosial yang membuat masyarakat mampu untuk bertindak dan membuat keputusan sendiri dalam arti yang lebih luas.¹²

Dalam perspektif universal mengenai pembangunan sosial menekankan bahwa pembangunan sosial tidak terbatas hanya pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, misalnya buruh miskin, para migran dan lain sebagainya. Pada dasarnya, akses yang sama terhadap *society's goods* – fisik maupun sosial – seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, modal usaha (ekonomi), dan kesetaraan gender baik laki-laki atau perempuan untuk dapat

¹² Christian Reutlinger dan Hans Günther Homfeldt. (2008). Social Development. *Marginalized Youth*, 383-386

berpartisipasi didalam kehidupan bermasyarakat harus tersedia. Partisipasi yang setara terhadap kesempatan untuk memenuhi kebutuhan harus diberikan tanpa terkecuali, kaya atau miskin, kaum proletar ataupun mereka yang borjuis. Bahkan – sebagai contoh – ketika program pendidikan ditargetkan khusus pada kalangan miskin dan kalangan yang kurang beruntung lainnya, implikasinya harus selalu dilihat dalam kaitannya dengan masyarakat secara keseluruhan.¹³

Selanjutnya memasuki periode millennium ini, banyak sekali model-model pembangunan di negara-negara berkembang yang menemui kegagalan karena memisahkan pembangunan sosial dengan pembangunan ekonomi. Agenda pembangunan yang termasuk bagian dari bidang sosial seperti pendidikan dan kesehatan cenderung diabaikan oleh negara-negara berkembang yang memfokuskan pembangunan di negara masing-masing pada agenda ekonomi saja. Perspektif pembangunan sosial (*social development*) berbeda apabila dibandingkan dengan perspektif pembangunan (*development theory*) dalam melihat perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam perspektif *development theory*, definisi pembangunan hanya berputar-putar saja pada lingkaran pertumbuhan ekonomi atau *economic growth*. Perspektif ini memiliki pandangan bahwa pembangunan di suatu negara berjalan dengan baik itu tergantung pada jumlah GNP (*Gross National Product*) per kapita dan jumlah produksi yang dihasilkan. Berangkat dari pandangan ini, konsep pembangunan sosial (*social development*) kemudian muncul sebagai gagasan kontrapretasi

¹³ Ibid.

terhadap gagasan pembangunan yang ekonomistik dengan tidak mengabaikan permasalahan-permasalahan sosial seperti pendidikan yang rendah, kemiskinan dan pengangguran, disintegrasi sosial, diskriminasi gender dan kesenjangan sosial yang lebar antara masyarakat kaya dan miskin.¹⁴

Aktor yang terlibat dalam proses pembangunan adalah perbedaan lain antara perspektif pembangunan sosial dan pembangunan yang berorientasikan ekonomi. Pembangunan yang berorientasi pada ekonomi memiliki pandangan bahwa negara merupakan aktor tunggal yang dominan. Lain halnya dengan perspektif pembangunan sosial yang memberi peluang bagi aktor-aktor hubungan internasional kontemporer selain negara seperti korporasi (MNC), masyarakat sipil atau kalangan NGO untuk berkontribusi terhadap pembangunan, tidak menutup kemungkinan adanya kemitraan yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut. *World Summit on Sustainable Development* (2002) mendefinisikan kemitraan sebagai inisiatif sukarela para pemangku kebijakan (*stakeholders*) dengan berbagai pihak baik publik ataupun non-publik yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan) dalam desain dan implementasinya.¹⁵

4. Sustainable Development

¹⁴ Erza Wuri Estiningprang. Dalam skripsinya yang berjudul "*Implikasi Keterlibatan LSM Internasional dalam Pembangunan di Dunia Ketiga Studi Kasus: Kesuksesan Program Perlindungan Sosial Perkotaan oleh Oxfam di Nairobi, Kenya*". HI 15 UMY, Yogyakarta, 2015, hal. 13-14

¹⁵ United Nations. "*UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda*" <http://www.un.org/> Di akses pada tanggal 6 April 2016 pukul 3.14

Sustainable Development atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pembangunan berkelanjutan dapat ditafsirkan dengan berbagai cara pandang atau perspektif, namun inti dari konsep ini adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pada tahun 1987, *World Commission on Environment and Development* menerbitkan laporannya yang juga memperkenalkan konsep baru dalam pembangunan internasional yakni “Pembangunan Berkelanjutan – *Sustainable Development*”. Konsep pembangunan berkelanjutan ini dimaksudkan untuk membantu mengenalkan serta membentuk agenda internasional dan sikap masyarakat internasional terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Konsep *Sustainable Development* ini juga mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang kuat, dengan fokus utama pada orang-orang yang memiliki standar hidup yang rendah. Selain itu, sejalan dengan agenda pembangunan ekonomi dan sosial, konsep ini juga menekankan pentingnya melindungi basis sumber daya alam dan lingkungan, maksudnya sesederhana jika kesejahteraan ekonomi dan sosial tidak menjadi baik jika dibarengi dengan tindakan yang menghancurkan lingkungan. Meskipun agak samar-samar, konsep *Sustainable Development* ini bertujuan untuk menjaga kemajuan ekonomi dan sekaligus melindungi nilai-nilai kearifan lingkungan jangka panjang.

Mewujudkan kerangka kerja multilateral kerjasama Pembangunan Berkelanjutan (SD) membutuhkan beberapa upaya konkrit di dalamnya. Yang

pertama, adalah dimensi normatif yang bersangkutan dengan evolusi, norma, peraturan dan prinsip yang kemudian mendeterminasikan tindakan apa yang seharusnya. Kedua, dimensi kognitif (ideasional) yakni perubahan dalam pemahaman pelaku tentang hubungan antara lingkungan dan pembangunan yang menjadi dasar untuk memilih tindakan yang lebih tepat sasaran. Terakhir, adalah dimensi regulatif, yaitu konteks dan pengaturan terstruktur dimana aktor Negara dan aktor non-negara berusaha untuk berkolaborasi (bermitra) dan mengkoordinasikan program atau aktivitas untuk mencapai tujuan berkelanjutan.

Kemitraan sebagai bentuk kolaborasi dan kerjasama pada tingkat global, regional maupun nasional menjadi sangat penting untuk pendekatan yang lebih partisipatif dan implementatif terhadap pembangunan yang berkelanjutan di era globalisasi saat ini. Komunitas global – pemerintah, korporasi, lembaga pemerintah internasional dan sektor non-profit (NGO) – telah menyadari pentingnya kemitraan dalam proses pembangunan internasional. Korporasi memiliki potensi, modal dan efisiensi yang berdampak positif terhadap pemerintahan. Akan tetapi, ada kekhawatiran yang muncul bahwa korporasi tidak selalu memiliki rasa tanggung jawab terhadap sosial (CSR). Korporasi sejatinya sadar akan hal itu, namun permasalahannya terletak pada minimnya pengetahuan dan dedikasi korporasi untuk melaksanakan program-program pembangunan sosial. Sebaliknya, NGO disatu sisi telah menjadi agen yang sangat penting terhadap agenda pembangunan internasional,

akan tetapi permasalahan umum yang NGO hadapi terletak pada minimnya sarana dan sumber daya untuk melaksanakan proyek-proyek mereka secara efisien dan berkelanjutan. Inilah sebab mengapa kolaborasi antara korporasi dan NGO terhadap pembangunan internasional telah menjadi tren global saat ini.¹⁶

Warga negara Republik Zambia khususnya perempuan mengalami krisis hak-hak kebutuhan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2014 Human Development Index warga negara Zambia menempati peringkat 141 dari 178 negara. Kualitas pendidikan di Zambia masih sangat rendah, jumlah tenaga pengajar yang sedikit menjadi persoalan yang dilematis di negara penghasil tembaga ini. Menurut africaneconomicoutlook.org, Zambia dapat dipastikan tidak akan mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) pada beberapa indikator seperti angka buta huruf yang tinggi, akses air bersih dan sanitasi, dan angka kematian anak dan kesehatan ibu yang masih tinggi.

Perempuan Zambia mengalami diskriminasi terkait persoalan pendidikan karena kemiskinan. Perempuan Zambia memiliki presentase yang paling mungkin untuk putus sekolah, dampaknya sangat mengkhawatirkan dimana kemiskinan, pernikahan dini dan kehamilan membuat perempuan Zambia menjadi rentan terhadap penderitaan. Padahal Perempuan adalah

¹⁶ Corinne Damlamian, dalam *papernya* yang berjudul, *“Corporate-NGO Partnerships for Sustainable Development: How corporations and Nongovernmental Organizations Can Work Together, Illustrated with Examples From Their Fair Trade Movement”*. University of Pennsylvania. Amerika Serikat. 2006. Hal. 3-5

pelopor pembangunan internasional, perempuan akan menginvestasikan segala yang mereka miliki untuk masa depan anak-anak di seluruh dunia. Oleh karena itu, pemberdayaan sosial yang termasuk dalam agenda pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya pembangunan di suatu negara membutuhkan partisipasi dan kerjasama dengan siapa saja, kolaborasi sektor publik dan non-publik, korporasi dan LSM.

D. Hipotesa

Berdasarkan konsep teori diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa cara kemitraan pembangunan sosial oleh korporasi Goldman Sachs dan NGO Campaign for Female Education (Camfed) International dalam memberdayakan perempuan di Republik Zambia tahun 2008-2010:

1. Melalui Implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh Goldman Sachs secara kolaboratif
2. Menggunakan strategi Social Development melalui kemitraan korporasi Goldman Sachs dan NGO Camfed International

E. Jangkauan Penelitian

Dalam suatu tulisan ilmiah diperlukan pembatasan masalah guna menghindari terjadinya disintegrasi dan berimplikasi pada ruang lingkup jika pembahasan tidak dibatasi. Oleh karena itu dalam setiap penulisan ilmiah selalu dibutuhkan pembatasan masalah atau dengan menggunakan jangkauan penelitian.

Fokus utama dalam penulisan skripsi ini meliputi kolaborasi Goldman Sachs dan Camfed Internasional melalui program *10,000 Women's Initiative* di Zambia pada tahun 2008-2010. Pada tahun 2008, korporasi Goldman Sachs dan NGO Camfed International menandatangani serta memulai program pemberdayaan perempuannya di Zambia. Sementara di tahun 2010, Abigail Kaindu terpilih menjadi salah satu dari 10 pemuda-pemudi dalam kelompok *UN's Youth Advocacy Group* dan lebih dari 400 perempuan Zambia telah menyelesaikan pelatihannya melalui program *10,000 Women Initiative*.

Namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk memuat data dan fakta sebelum atau sesudah tahun tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang paling dasar dalam melaksanakan suatu penelitian. Jadi menjelaskan bahwa metodologi ialah salah satu bagian terpenting dalam melaksanakan suatu kegiatan penelitian ilmiah karena ketepatan penggunaan metodologi dipergunakan sebagai dasar pemecahan permasalahan, sehingga mampu memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif yakni menguraikan data-data yang diperoleh sehingga dapat membuktikan kebenaran hipotesa. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yaitu melalui studi pustaka dengan

¹⁷ Hadi S., *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 200), halaman 45.

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel baik dari koran maupun internet dan sumber lain yang dianggap relevan. Sehingga, diharapkan berbagai data yang diolah dan diperoleh dengan menggunakan metode ini mampu memberikan gambaran secara komprehensif mengenai program kemitraan yang dilakukan Goldman Sachs dan Camfed International terhadap pemberdayaan perempuan di Zambia.

G. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kolaborasi Goldman Sachs dan Camfed Internasional terhadap pemberdayaan perempuan di Zambia. Selain itu, tujuan utama penulis mengerjakan penelitian ini sebagai syarat dalam memperoleh gelar S-1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yang tidak kalah penting juga melalui penelitian ini penulis berusaha mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari proses perkuliahan dengan mengeksplanasi, mengeksplorasi serta mengelaborasi teori atau konsep dengan fakta-fakta yang ada dengan harapan dikemudian hari usaha yang telah dilakukan oleh penulis tidak menjadi sia-sia dan bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa Hubungan Internasional di seluruh dunia, terkhusus jajaran sivitas akademika Hubungan

Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjiwa muda, mendunia serta unggul dan islami.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah penulis dalam pelaksanaan penelitian, maka dibuatlah sistematika penulisan skripsi yang terbagikan kedalam beberapa bab, antara lain:

BAB I : Bab pertama ini memaparkan bagian yang menjadi aspek fundamental dalam penulisan skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, landasan teori atau kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab kedua ini memaparkan tentang bagaimana proses pembangunan di Zambia menjadi hambatan yang dikarenakan berbagai permasalahan-permasalahan sosial seperti, kemiskinan, wabah virus HIV-AIDS dan diskriminasi terhadap perempuan

BAB III : Bab ketiga ini memaparkan tentang *Social Development Concept* sebagai alternatif pembangunan dan kerjasama antara korporasi dan LSM sebagai bentuk kekuatan baru dalam pembangunan sosial di era globalisasi, Dalam hal ini kemitraan korporasi Goldman Sachs dan Camfed International di Republik Zambia.

BAB IV : Bab Keempat ini memaparkan tentang bagaimana kolaborasi antara Goldman Sachs sebagai korporasi dan Camfed International sebagai LSM dalam

pembangunan sosial dan pemberdayaan perempuan di Zambia melalui strategi *Social Development* dan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*

BAB V : Bab kelima ini memaparkan tentang kesimpulan penulis mengenai penelitian yang penulis angkat pada skripsi kali ini.